

ANALISIS YURIDIS PP NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI PROVINSI KEPRI

Elza Syarief
Lu Sudirman
Deddy Eka Saputra

Abstract

Law No. 32 of 2004 on Local Government and Government Regulation No. 6 of 2010 on the Civil Service Police Unit has mandated that Public Protection is obligatory under the authority of both the Provincial and Local Government District and the City. On Government Regulation No. 6 of 2010 on the Civil Service Police Unit that requirements to be appointed as Municipal Police are civil servants, but in the province of Riau Islands Civil Service Police Unit number is still much that is not civil servant status. On Government Regulation No. 6 of 2010 on the Civil Service Police Unit that Article 16 point a that the requirements to be appointed as Municipal Police are civil servants, which Civil Service Police Unit has the task of enforcing local laws, organizing public order and peace and the protection of society, but to carry out this task Municipal Police Units are often contradictory and conflicted with the community.

Civil Service Police Unit has the task of helping the head area as Regional Regulatory enforcement to create a serene area conditions, and orderly. Legal remedy solving problems where the Civil Service Police Unit of the police human resources of the Civil Service has had Permendagri 38 of 2010 on the Civil Service Training police, merging function that refers Satlinmas Regulation No. 6 of 2010 on the civil service and police force Regional Government only raised police members of the Civil Service only for the status of Civil Servants.

Keywords: Municipal Police Units, Local Rules, Civil Servants

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan yang terkandung di dalam penjelasan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja telah mengamanatkan bahwa Perlindungan Masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, maka peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) mempunyai posisi yang strategis dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Oleh karena itu Satlinmas perlu terus diberdayakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga keamanan lingkungan, membantu dalam penanganan bencana, juga ikut serta dalam penanganan momen-momen yang bersifat lokal maupun nasional, seperti antara lain Pemilihan Umum anggota Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,